BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Besarnya populasi yang terus bertambah, Indonesia menghadapi tantangan penting terkait penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja menjadi faktor mendasar dalam pembangunan ekonomi, terutama bagi negara berkembang dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan dihitung berdasarkan besaran pendapatan riil per kapita. Pembangunan ekonomi di Indonesia terutama bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan pemerataan distribusi barang-barang primer, meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan memperbaiki mutu pendidikan, serta memperluas alternatif ekonomi dan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat (Wihastuti & Rahmatullah, 2018).

Tenaga kerja diartikan jumlah penduduk usia produktif yang turutserta dalam memproduksi barang dan jasa ketika terdapat permintaan akan tenaga kerja (Gani *et al*., 2023). Permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi. Penyebabnya adalah peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan, sementara ketersediaan lapangan pekerjaan tidak mengalami peningkatan yang sepadan. Peningkatan jumlah angkatan kerja memerlukan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Akan tetapi, kenyataannya ketersediaan lapangan pekerjaan tidak selalu mencukupi. Pertumbuhan populasi berpengaruh positif dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Atas dasar itu, penguasaan keterampilan yang relevan dan SDM yang kompeten menjadi syarat penting bagi para tenaga kerja memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasinya dan standar hidup yang baik. Sebaliknya, individu yang kurang kompetitif berisiko terpinggirkan dan menjadi pengangguran.

Penyerapan tenaga kerja merupakan isu penting di era transformasi teknologi. Kemajuan pesat dalam otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan pada bidang ketenagakerjaan global. Di satu sisi, inovasi teknologi berpotensi meningkatkan produktivitas dan memunculkan peluang kerja

baru. Akan tetapi, di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait pergeseran kebutuhan jenis pekerjaan, yang berpotensi menyebabkan peningkatan pengangguran. Dengan demikian, penelitian mengenai penyerapan tenaga kerja menjadi semakin penting untuk menganalisis dampak transformasi digital terhadap pasar kerja serta merumuskan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi tantangan di masa mendatang.

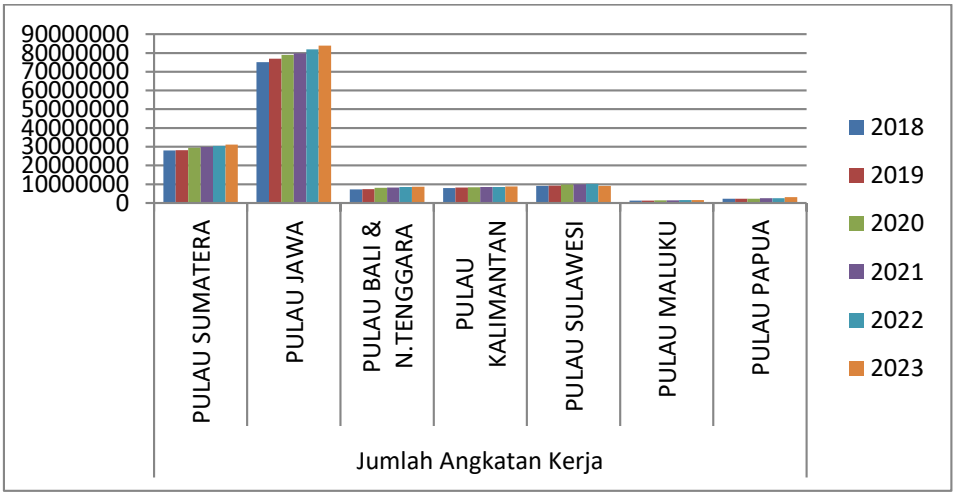

Sumber: BPS. Data Diolah

Gambar 1.1. Jumlah Angkatan Kerja Di Pulau-Pulau Indonesia dari Tahun 2018-2023

Pulau Jawa, sebagai pusat perekonomian Indonesia, memegang peranan penting dalam kontribusinya terhadap jumlah angkatan kerja nasional. Data yang disajikan di Gambar 1.1 pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa Pulau Jawa mempunyai jumlah angkatan kerja tertinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia sebanyak 83.943.799 jiwa. Konsentrasi penduduk, aktivitas industri, dan pusat pemerintahan di pulau ini menjadi daya tarik bagi migrasi penduduk dari berbagai wilayah. Konsekuensinya, Pulau Jawa menjadi tempat berdomisili bagi jutaan individu yang tergolong dalam angkatan kerja. Kondisi geografis yang relatif terbatas dengan kepadatan penduduk yang tinggi, serta sejarah perkembangan ekonomi yang lebih matang dibandingkan pulau-pulau lain, turut andil dalam dominasi Pulau Jawa dalam hal kuantitas angkatan kerja (Wihastuti & Rahmatullah, 2018) .

Dominasi Pulau Jawa dalam kuantitas angkatan kerja menimbulkan implikasi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Di satu sisi, besarnya jumlah angkatan kerja merupakan potensi substansial bagi pertumbuhan ekonomi, menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat produksi barang dan jasa sekaligus pasar konsumsi yang besar. tersendiri, khususnya terkait penyediaan lapangan kerja yang memadai, peningkatan

Namun, di sisi lain, tingginya jumlah angkatan kerja juga menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya terkait penyediaan lapangan kerja yang mencukupi, peningkatan kualitas SDM dan penekanan angka pengangguran.

Permasalahan penyerapan tenaga kerja masih menjadi isu penting yang belum sepenuhnya teratasi. Kondisi ini disebabkan tingginya jumlah masyarakat usia produktif yang belum memperoleh pekerjaan, sementara ketersediaan lapangan kerja belum mampu menampung seluruh angkatan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja juga memperketat persaingan di pasar kerja, sehingga keunggulan dalam keterampilan dan pengetahuan menjadi modal penting bagi individu untuk memperoleh pekerjaan yang relevan. Individu yang kurang memiliki modal tersebut akan menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan dan berpotensi menjadi pengangguran (Adriyanto *et al*., 2020).

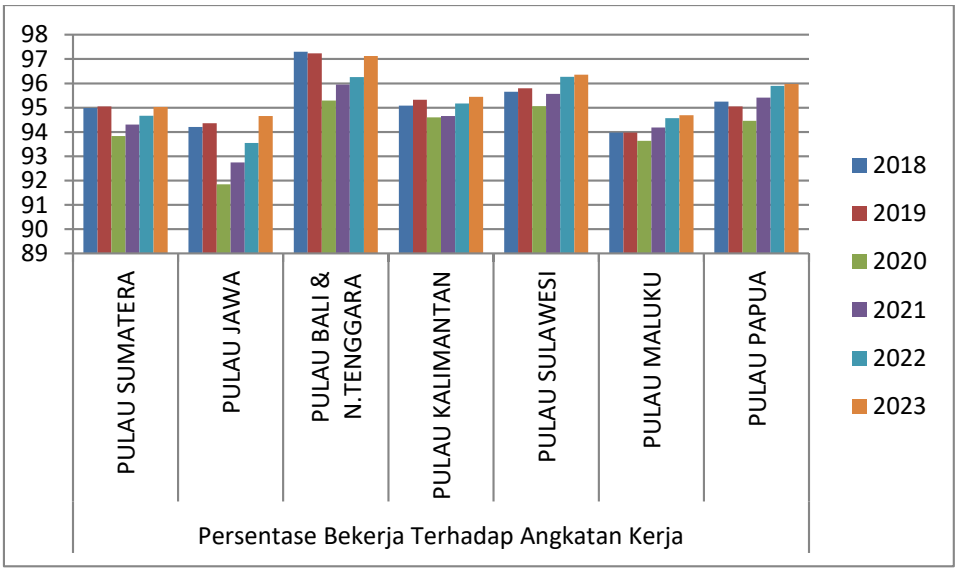

Sumber: BPS. Data Diolah

Gambar 1.2 Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Di Pulau-Pulau Indonesia dari Tahun 2018-2023

Meskipun memiliki jumlah angkatan kerja terbesar di Indonesia, persentase penduduk yang bekerja dibandingkan total angkatan kerja justru lebih rendah dibandingkan pulau-pulau lain. Data dalam Gambar 1.2 menunjukkan bahwa persentase tersebut di provinsi Pulau Jawa dari tahun 2018 hingga 2023 lebih rendah dibandingkan pulau-pulau lainnya dengan rata-rata sebesar 93,55%. Sementara Pulau Sumatera dengan rata-rata sebesar 94,65%, Pulau Bali & Nusa Tenggara dengan rata-rata sebesar 96,53%, Pulau Kalimantan dengan rata-rata sebesar 95, 05%, Pulau Sulawesi dengan rata-rata sebesar 95,78%, Pulau Maluku dengan rata-rata sebesar

94,17%, dan Pulau Papua dengan rata-rata sebesar 95,34%. Fenomena ini mengindikasikan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di Pulau Jawa. Pesatnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang masif, dan struktur ekonomi yang didominasi sektor informal menjadi faktor utama yang berkontribusi pada kondisi ini. Tingginya tingkat pengangguran terbuka, terutama di kalangan pemuda dan lulusan baru, memperburuk situasi ini.

Sebagai pulau dengan populasi angkatan kerja terbesar di Indonesia, Pulau Jawa menghadapi permasalahan serius dalam penyerapan seluruh tenaga kerja produktif. Selain dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang pesat dan dominasi sektor informal, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) juga memegang peranan krusial dalam menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Sebagai bagian dari komponen biaya produksi, upah ialah kompensasi yang diberikan produsen kepada tenaga kerja atas kontribusinya dalam proses produksi. Dalam kerangka teori permintaan tenaga kerja, upah dianggap seperti nilai atau biaya dari penggunaan tenaga kerja. Permintaan diartikan kapasitas produksi penuh atau jasa yang ingin diakuisisi pembeli pada setiap tingkat harga yang potensial dalam periode tertentu (Wihastuti & Rahmatullah, 2018). Dalam konteks ketenagakerjaan, permintaan tenaga kerja menunjukkan hubungan antara tingkat upah yang ditawarkan dan jumlah pekerja yang ingin direkrut oleh perusahaan.

Studi-studi berdasarkan data nyata menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum provinsi bisa meningkatkan jumlah pekerja yang terserap. Penelitian dari (Budiasih, 2024) terdapat pengaruh positif antara upah dan penyerapan tenaga kerja, mengindikasikan peningkatan upah dipandang sebagai insentif bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan. Kenaikan upah ini diasumsikan dapat meningkatkan motivasi dan daya tarik bagi tenaga kerja terampil untuk memasuki atau tetap berada dalam pasar kerja. Dengan demikian, upah yang lebih tinggi berpotensi mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, khususnya pada segmen tenaga kerja yang berkualifikasi. Penelitian dari (Asmara *et al.*, 2024) juga mendukung temuan ini. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada faktor-faktor penyebab penyerapan tenaga kerja secara umum. UMP, sebagai standar upah terendah bagi pekerja, seringkali menjadi perdebatan antara pengusaha dan pekerja.

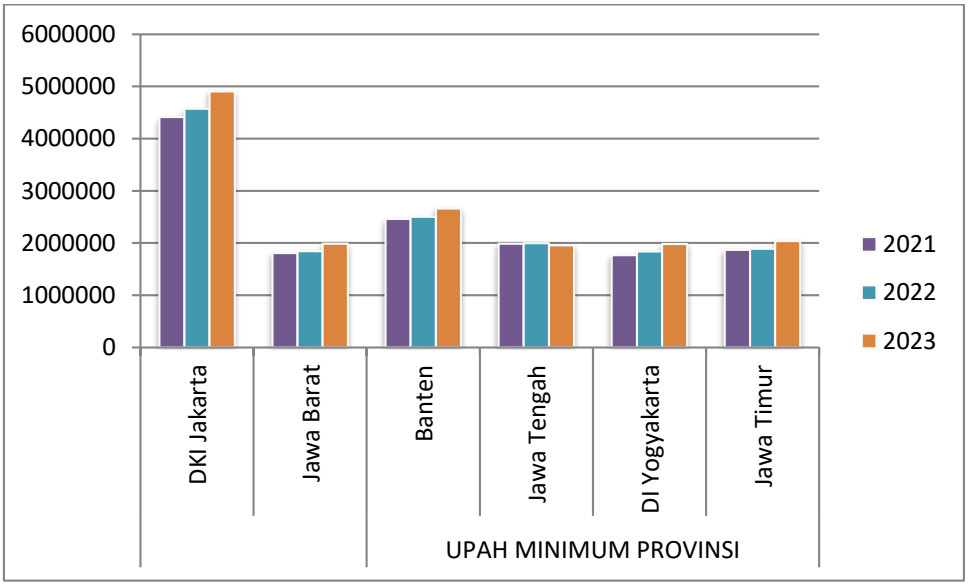

Sumber: BPS. Data Diolah

Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa 2021-2023 (Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.3 Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia, konsisten menetapkan UMP yang melampaui provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Pada tahun 2023 Provinsi UMP DKI Jakartasebesar 4.901.798 rupiah, sedangkan Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 1.986.670, Provinsi Banten sebesar 2.661.280, Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.958.169, Provinsi DI Yogyakarta sebesar 1.981.782, dan Provinsi Jawa Timur sebesar 2.040.244. Persaingan untuk menarik tenaga kerja berkualitas tinggi mendorong provinsi-provinsi lain juga menaikkan upah minimum provinsi mereka setiap tahunnya. Upah minimum merupakan batas bawah upah yang bertujuan melindungi pekerja berpenghasilan rendah. Peningkatan upah minimum berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat yang selanjutnya mendorong peningkatan permintaan dan menarik lebih banyak perusahaan untuk memasuki pasar. Hal ini berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan. Kenaikan upah mendorong pengusaha memperluas unit usaha, upaya tersebut diproyeksikan akan menambah kesempatan kerja. Selain itu, penetapan Imbalan yang sepadan dengan kinerja dan tanggung jawab melalui kebijakan upah minimum berpotensi mengurangi kemiskinan (Ramadhona & Azizah, 2022).

Selain menyoroti dinamika upah minimum provinsi, penting untuk menganalisis bagaimana penanaman modal asing turut memainkan peran penting menciptakan peluang kerja baru. Informasi PMA penting sebagai indikator kondisi ekonomi suatu negara, mencerminkan daya tarik investasi global, menjadi sumber pembiayaan

pembangunan, memfasilitasi transfer teknologi dan keahlian, berpotensi menciptakan lapangan kerja, serta memengaruhi neraca pembayaran dan arah kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, analisis data PMA menjadi penting dalam memahami dinamika investasi internasional dan implikasinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Data PMA merupakan catatan menyeluruh mengenai arus investasi yang mencakup penanaman modal langsung, investasi portopolio, dan investasi lainnya, alokasi sektoral, negara asal investor, distribusi geografis di dalam negeri, serta bentuk investasi dalam kurun waktu tertentu.

Beberapa studi menunjukkan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil studi empiris (Sari & Sumanto, 2021) memperlihatkan variabel PMA berdampak positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sub sektor industri pengolahan, ini terbukti dari nilai t-hitung sebesar 2,3367 dengan nilai probabilitas 0,0242 berada dibawah 0,05 dan didukung penelitian dari (Setyo & Juliprijanto, 2023) secara jangka panjang, studi ini menunjukkan bahwa UMP bersama dengan investasi dalam negeri dan investasi asing, bersama-sama berdampak positif dan signifikan pada tingkat penyerapan tenaga kerja.

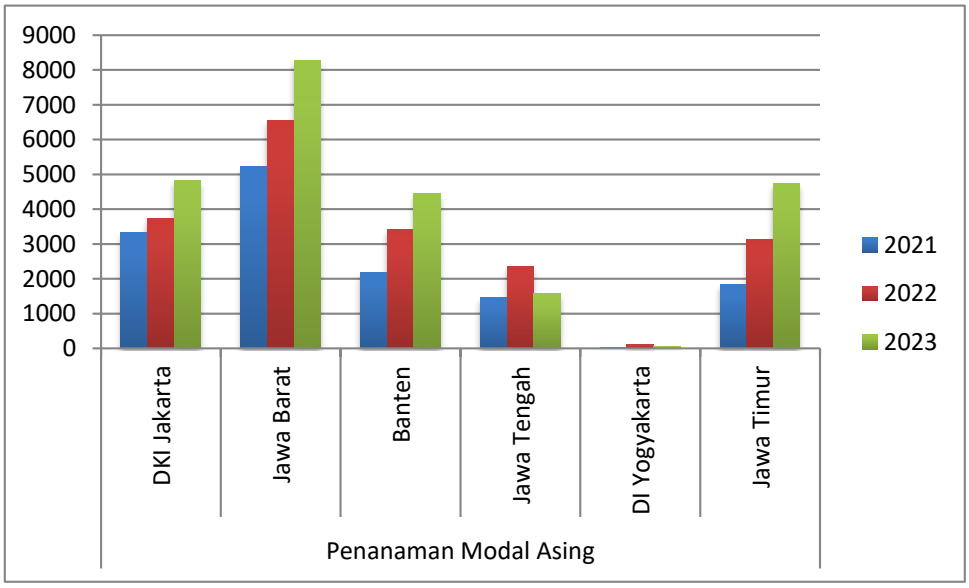

Sumber: BPS. Data Diolah

Gambar 1.4 PMA Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa 2021-2023 (US$)

Berdasarkan Gambar 1.4, terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat mendapatkan PMA tertinggi dari provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa sebesar 8283,7 juta US$ dan terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 46 juta US$ pada tahun 2023. Jawa Barat

seringkali menarik investasi asing lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia karena kombinasi beberapa faktor strategis. Jawa Barat menawarkan pasar domestik yang besar dan terpusat, infrastruktur yang relatif lebih maju dibandingkan wilayah lain, konsentrasi lembaga keuangan dan perusahaan besar serta aksesibilitas yang lebih baik ke jaringan transportasi internasional. Investor yang membutuhkan keterampilan khusus sering kali tertarik pada tenaga kerja yang terampil dan semi-terampil.

Selain penanaman modal asing, dinamika investasi yang bersumber dari dalam negeri juga memegang peranan penting dalam pembentukan lapangan kerja. Mobilisasi dana dan sumber daya oleh pelaku ekonomi domestik secara langsung berkontribusi pada perluasan berbagai sektor, menciptakan permintaan tenaga kerja yang beragam. dengan karakteristiknya yang lebih dekat dengan kondisi pasar dan potensi untuk memperkuat rantai nilai lokal, investasi dalam negeri diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan unit usaha baru dan pengembangan kapasitas produksi yang berkelanjutan.

Berbagai kajian empiris mengindikasikan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Temuan studi empiris (Sari & Sumanto, 2021) memperlihatkan variabel PMA berdampak positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sub sektor industri pengolahan. Terbukti dari nilai t-hitung sebesar 2,3367 dengan probabilitas 0,0242 < 0,05 serta diperkuat oleh temuan penelitian dari (Setyo & Juliprijanto, 2023) studi ini menemukan bahwa, dalam jangka panjang, upah minimum provinsi bersama dengan PMDN dan PMA simultan berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.

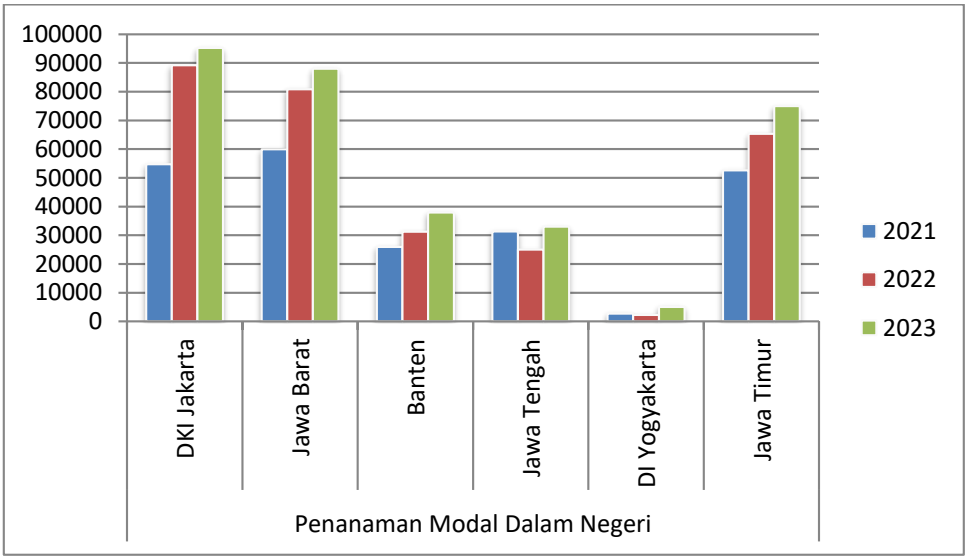

Sumber: BPS. Data Diolah

Gambar 1.5 PMDN Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa 2021-2023 (Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.5, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan PMDN tertinggi dari provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa sebesar 95202.1 miliar rupiah dan terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 5015,5 milyar rupiah pada tahun 2023. DKI Jakarta mendominasi penerimaan investasi dalam negeri di Pulau Jawa karena posisinya sebagai pusat perekonomian dan bisnis utama Indonesia. Status ini menawarkan pasar domestik yang paling besar dan terpusat, infrastruktur yang lebih unggul dibandingkan provinsi lain di Jawa serta banyaknya kantor pusat perusahaan dan lembaga keuangan, serta kemudahan akses ke transportasi. DKI Jakarta juga memiliki keunggulan dalam hal peraturan dan birokrasi investasi yang lebih terpusat dan diharapkan lebih efisien, menjadikannya pilihan utama bagi investor domestik yang ingin memanfaatkan potensi ekonomi. Ketersediaan tenaga kerja dengan beragam keahlian juga menjadi daya tarik penting bagi perusahaan.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi sekarang menjadi pendorong utama peningkatan produktivitas tenaga kerja. Otomatisasi proses, pemanfaatan analitik data, serta konektivitas yang semakin luas memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien dan efektif, sehingga membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian digital. Namun, akses terhadap teknologi tidak terdistribusi secara merata. Maka dari itu, sangat penting untuk mengupayakan agar setiap individu memiliki kesempatan mempelajari keterampilan digital agar dapat berpartisipasi dalam kemajuan teknologi.

Teori Pertumbuhan Neoklasik (Solow-Swan) merupakan kerangka teoretis yang berkaitan erat dengan teknologi dan ketenagakerjaan. Dalam pandangan teori ini, pertumbuhan ekonomi terbentuk karena pengaruh oleh keberadaan faktor-faktor produksi (meliputi populasi, angkatan kerja, dan penumpukan modal) juga laju kemajuan teknologi yang tercermin dalam IP-TIK diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuka lebih banyak lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan TIK. Namun, di sisi lain, otomatisasi dan digitalisasi juga dapat mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Solow memberikan penekanan pada peran penting perkembangan teknologi (Yuniar & Devi, 2024). Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa IP-TIK berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian dari (Almizan, 2020) mengungkapkan peningkatan variabel IP-TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

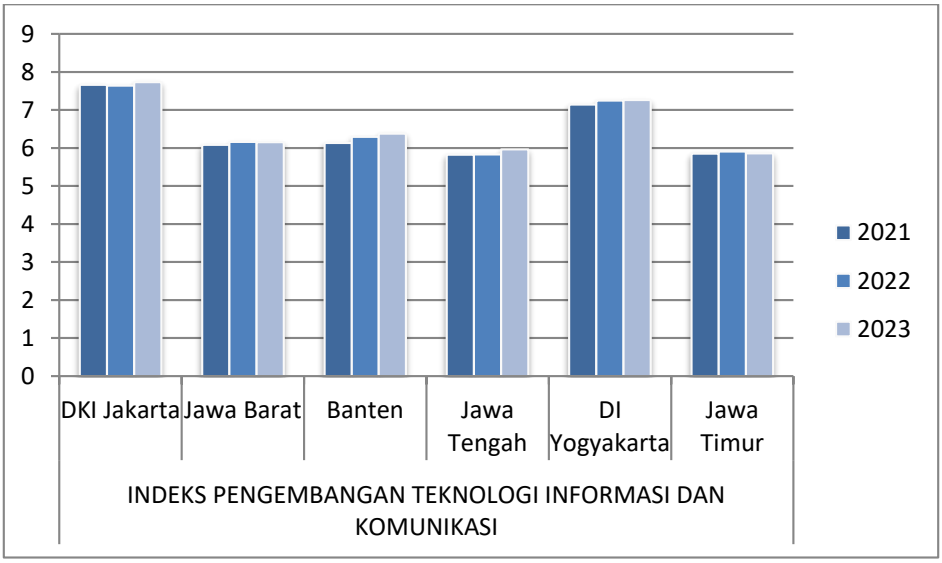

Sumber: BPS. Data Diolah

Gambar 1.6 IP-TIK Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa 2021-2023 (Indeks)

Berdasarkan Gambar 1.6 terlihat bahwa IP-TIK di Pulau Jawa memperlihatkan peningkatan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan pemanfaatan teknologi digital yang semakin meluas di wilayah ini. Provinsi DKI Jakarta secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam hal IP-TIK, tercatat indeks di DKI Jakarta sebesar 7,73 pada tahun 2023 dan diikuti indeks di DI Yogyakarta sebesar 7,26. Perkembangan IP-TIK memberikan dampak positif bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas. Modal manusia yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan

maupun keterampilan, menjadi faktor penentu utama keberhasilan individu dalam memasuki dunia kerja. Individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang memenuhi tuntutan pasar akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya. Sebaliknya, individu yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dan kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan berisiko mengalami pengangguran.

Berlatarbelakangi permasalahan terkait penyerapan tenaga kerja di Indonesia terutama di Pulau Jawa dengan data angkatan kerjadari 2012-2023 menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki jumlah angkatan kerja tertinggi di antara pulau lain, namun persentase penduduk yang bekerja justru lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja yang diperparah oleh pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi. Penetapan UMP sebagai bagian dari biaya produksi turut memengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut pekerja selaras dengan teori permintaan tenaga kerja yang melihat upah sebagai harga tenaga kerja. Selain itu, peran PMA dan PMDN juga diyakini signifikan dalam menciptakan lapangan kerja melalui investasi dan perluasan kegiatan ekonomi. Di tengah kemajuan teknologi seperti otomatisasi dan digitalisasi membawa peluang dan tantangan bagi pasar tenaga kerja, riset ini berupaya menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa dengan fokus pada peran UMP, PMA, dan PMDN serta IP-TIK.

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penyerapan tenaga kerja, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada penyusunan kebijakan yang efektif untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu, peneliti bermaksud meriset penelitian dengan judul "**Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Produktivitas Tenaga Kerja, Dan IP-TIK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa**".

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika perkembangan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, penanaman modal asing, PMDN, dan IP-TIK terhadap terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi-provinsi Di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, ssecara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika perkembangan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum provinsi, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan IP-TIK terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi-provinsi Di Pulau Jawa.

1.4. Manfaat penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, harapannya penelitian ini mampu berkontribusi berupa beberapa manfaat, antara lain:

1. Secara Akademis

   Studi ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman lebih luas perihal faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia, dengan penekanan pada konteks Pulau Jawa. Temuan dari studi ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan bagi penelitian-penelitian di kemudian hari.
2. Secara Praktis

   Hasil studi ini diharapkan menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif baik bagi pemerintah dan perusahaan serta dapat disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran pentingnya keterampilan dan peran teknologi dalam dunia kerja.